

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Laut Natuna memiliki sumber daya perikanan dan kelautan yang besar, sehingga tidak heran kalau hal itu sering dimanfaatkan oleh negara lain demi keuntungan mereka sendiri. Laut Natuna yang masuk ke dalam zona rawan *Illegal Fishing* sering di eksploitasi sumber dayanya oleh negara asing terutama negara yang dekat dengan Laut Natuna. Vietnam merupakan salah satu negara yang sering mengeksploitasi sumber daya perikanan yang ada di Laut Natuna.

Vietnam merupakan negara pelaku utama *Illegal Fishing* di Indonesia. Dalam melakukan tindakan *Illegal Fishing* di kawasan perairan Laut Natuna, Vietnam menerapkan beberapa modus baru untuk melancarkan aksinya. Dalam menangkap ikan, nelayan Vietnam sering menurunkan trol atau jaring besar. Hal tersebut dilakukan untuk menangkap ikan lebih banyak dan menghasilkan keuntungan lebih banyak. Tindakan Vietnam yang menggunakan alat-alat yang tidak diizinkan untuk menangkap ikan dapat mengakibatkan rusaknya habitat ikan seperti terumbu karang dan ekosistem laut lainnya.

Adanya *Illegal Fishing* di Indonesia khususnya di Laut Natuna, menyebabkan kontribusi bidang perikanan bagi perekonomian Indonesia kurang maksimal dan terganggu. Indonesia tidak masuk dalam sepuluh besar eksportir hasil laut terbesar di dunia. Indonesia bahkan masih kalah saing dari Vietnam terkait dengan eksportir ikan. Padahal apabila dilihat dari luas laut dan potensi yang dimiliki oleh laut Indonesia, hal tersebut tidak mungkin bisa terjadi karena Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dunia.

Ada setidaknya tiga faktor yang menyebabkan *Illegal Fishing* marak terjadi di kawasan perairan Laut Natuna yaitu motivasi untuk mendapatkan profit ekonomi yang besar, governance yang masih lemah, dan penegakan hukum yang masih lemah. Pada tahun 2020 tercatat kerugian yang ditimbulkan akibat *Illegal Fishing* adalah 56,11 triliun dibandingkan

30 triliun per tahun pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan kalau kerugian akibat *Illegal Fishing* Vietnam mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Kerugian lain akibat *Illegal Fishing* Vietnam di Laut Natuna adalah nelayan lokal yang tersingkir akibat adanya *Illegal Fishing*. Nelayan lokal Natuna menjadi kalah saing dengan nelayan asal Vietnam karena alat tangkap yang digunakan oleh nelayan lokal lebih sederhana dari alat yang digunakan oleh Vietnam. Sehingga tangkapan nelayan lokal lebih sedikit dari hari ke hari. Hal ini mengakibatkan sebagian besar nelayan lokal Natuna beralih profesi menjadi peternak ikan budidaya.

Maraknya *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Vietnam di kawasan perairan Laut Natuna juga disebabkan oleh sengketa batas laut yang belum disepakati oleh Indonesia dan Vietnam. Sampai 2019 perundingan antar kedua negara hanya sampai tahap negosiasi saja. Kedua negara telah melakukan banyak pertemuan untuk membahas mengenai penentuan batas laut antar kedua negara. Namun, walaupun sudah melakukan banyak pertemuan batas landas dan juga penentuan ZEE antara Indonesia dan Vietnam belum dapat disepakati. Akibatnya terdapat wilayah tumpang tindih dimana kedua negara saling klaim wilayah tersebut dan akhirnya merasa bebas untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut.

Selain itu adanya *Illegal Fishing* di Laut Natuna oleh nelayan Vietnam juga disebabkan oleh keberanian dari nelayan Vietnam itu sendiri untuk melakukan *Illegal Fishing* di Laut Natuna. Mereka menjadi berani karena adanya pengawalan dari aparat penegak hukum Vietnam itu sendiri. Sudah saatnya Indonesia dapat memastikan dan mengamankan sumber daya alam kelautan di Indonesia terkhusus di Laut Natuna agar terus ada untuk generasi-generasi yang akan datang. Dengan demikian mereka dapat menikmati hal yang sama seperti apa yang dinikmati oleh generasi yang ada saat ini.

Illegal Fishing di Laut Natuna telah mengancam keamanan Indonesia. Rendahnya jumlah kapal pengawas asal Indonesia, mengakibatkan kurangnya pengawasan bagi kapal asing yang masuk ke Laut Natuna. Akibatnya para nelayan asing asal Vietnam mudah masuk

menembus pengawasan dari aparat asal Indonesia. Hal tersebut tentu saja meningkatkan ancaman *Illegal Fishing* di laut Natuna. Dalam menangani *Illegal Fishing*, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melihat kedaulatan sebagai kunci menangani *Illegal Fishing*.

Salah satu pilar dari kebijakan Poros Maritim Dunia yang diterapkan sejak tahun 2014 merupakan diplomasi maritim. Indonesia terus melindungi kedaulatan negara di wilayah perairan melalui diplomasi maritim. Wilayah yang dilindungi termasuk wilayah perairan Laut Natuna. Hal tersebut dilakukan agar potensi yang didapat dari bidang perikanan didapat secara maksimal. Selain itu, Indonesia ingin menunjukkan bahwa negara ini merupakan negara maritim, yang bisa memanfaatkan hasil lautnya dengan maksimal.

Strategi Indonesia sebagai negara dengan doktrin poros maritim dunia selama pemerintahan Joko Widodo, mengukuhkan perlunya pengamanan perairan di Indonesia dan penyelesaian daerah perbatasan. Diplomasi maritim Indonesia adalah salah satu upaya untuk menjaga keutuhan wilayah. Diharapkan, dengan melakukan diplomasi maritim ini, negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia memiliki perjanjian dan saling menghormati satu dengan yang lain.

Diplomasi maritim merupakan salah satu pilar penting dalam kebijakan kelautan Indonesia. Diplomasi maritim menempati peran penting dalam terwujudnya cita-cita serta dan visi Indonesia menjadi negara maritim yang kuat di dunia. Prinsip dasar diplomasi maritim Indonesia berdasarkan tujuan nasional Indonesia dan rekam jejak nasional dapat diartikan dalam tiga hal utama yaitu independen dan proaktif, berorientasi pembangunan, dan menggunakan pendekatan berbasis aturan atau *rules based approach*.

Christian Le Miere telah membagi tiga bentuk diplomasi maritim yaitu diplomasi kooperatif, persuasif dan koersif. Miere juga berpendapat bahwa *maritime forces* bertindak sebagai aktor utama dalam menjalankan diplomasi maritim karena peranan yang dilakukan di lapangan. Indonesia melalui berbagai aktor diplomasi maritim Indonesia seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah aktor yang menjalankan misi diplomasi maritim untuk melindungi sumber daya kelautan Laut Natuna.

Adapun bentuk diplomasi maritim Indonesia terhadap Vietnam dalam bentuk diplomasi kooperatif berupa kerja sama yang terjalin antara kedua negara yaitu Indonesia dan Vietnam. Upaya Indonesia dalam melaksanakan diplomasi kooperatif terlihat dari upaya Indonesia terlibat dalam forum-forum kerja sama. Selain itu Indonesia juga berupaya menjalin kesepakatan bilateral dengan Vietnam.

Contoh bentuk diplomasi maritim secara kooperatif antara Indonesia dan Vietnam adalah Indonesia-Vietnam Strategic Plan 2013. Kemudian strategic plan tersebut dilanjutkan pada tahun 2018 dan akan berlaku sampai 2023. PoA kemitraan strategis ini membahas banyak sektor kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Vietnam. Secara garis besar tidak banyak perbedaan dari kemitraan strategis fase pertama pada tahun 2013 yang lalu. Akan tetapi pada kemitraan strategis fase yang kedua ini, muncul beberapa poin baru salah satunya terkait usaha dalam memerangi *Illegal Fishing* yang ada di poin 13.

Upaya diplomasi Indonesia dalam hal *Illegal Fishing* di kawasan Laut Natuna terhadap Vietnam untuk mengatasi pencurian hasil laut yang dilakukan oleh nelayan asing asal negara tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pertemuan yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam. Pertemuan tersebut membahas mengenai kepentingan kedua negara dan berbagai pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi. Kerja sama antara Indonesia dan Vietnam dalam rangka mencegah *Illegal Fishing* terjalin di tahun 2018 sebagai bentuk dari diplomasi maritim kooperatif. Masalah yang dibahas secara spesifik adalah kerugian yang dialami oleh Indonesia akibat *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan-nelayan Vietnam.

Diplomasi yang diimplementasikan oleh Indonesia selain diplomasi maritim dalam bentuk kooperatif adalah diplomasi maritim dalam bentuk persuasif. Upaya diplomasi dalam bentuk persuasif Indonesia dapat diartikan sebagai tindakan Indonesia yang berusaha untuk mendorong pengakuan negara lain dalam usaha dan kepemimpinan Indonesia dalam sektor kemaritiman. Diplomasi maritim persuasif bertujuan menguatkan pengakuan pihak lain terhadap kekuatan nasional suatu negara yang antara lain dengan menunjukkan kekuatan

angkatan lautnya dengan kata lain melakukan demonstrasi kekuatan militer (Setiawan & Zaman, 2020).

Pengawasan kapal asing Vietnam yang masuk ke Laut Natuna oleh aparat Indonesia yang melakukan pengawasan merupakan salah satu tindakan diplomasi persuasif yang dilakukan Indonesia terhadap Vietnam. Tentu saja kegiatan tersebut sering dilakukan oleh Indonesia akibat banyaknya ancaman tindakan *Illegal Fishing* oleh kapal-kapal asing, salah satunya adalah kapal-kapal Vietnam.

Diplomasi maritim koersif dilakukan dengan menggunakan instrumen militer untuk mengamankan kepentingan nasional suatu negara di perairan. Gunboat policy merupakan istilah lain dari diplomasi maritim koersif. Tindakan ini dilakukan dengan penggunaan kekuatan maritim dengan menggunakan kapal perang untuk mengancam dan blokade maritim. Tujuan dari diplomasi maritim koersif ini adalah antara lain meningkatkan kekuatan maritim, akses maritim global, mencapai tujuan militer, menakut-nakuti target, dan memenangkan pertikaian.

Tindakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kapal-kapal ikan asing asal Vietnam merupakan tindakan diplomasi koersif yang dilakukan Indonesia terhadap Vietnam. Selain penenggelaman kapal, contoh lain dari diplomasi koersif yang dilakukan Indonesia terhadap Vietnam adalah pelaku *Illegal Fishing* yang dikenakan hukuman denda serta penjara.

Kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia terhadap nelayan asing asal Vietnam direspon oleh Vietnam sebagai reaksi keras Indonesia untuk meberantas *Illegal Fishing* di Indonesia khususnya di Laut Natuna. Selain Vietnam, negara di kawasan seperti Thailand, Malaysia dan Filipina juga beraksi keras terhadap kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia ini. Meski demikian kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia harus diikuti oleh Vietnam sebagai pelaku utama dari *Illegal Fishing* di Laut Natuna. Pemerintah Vietnam juga mengizinkan kapal asal negara mereka untuk ditangkap dan ditenggelamkan apabila terbukti melanggar dan sudah melalui prosedur yang berlaku.

Ketiga bentuk diplomasi yang telah dilakukan oleh Indonesia terhadap Vietnam dalam rangka untuk mengatasi *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia, khususnya di Laut Natuna. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi *Illegal Fishing*. Hal tersebut menegaskan bahwa Indonesia benar-benar berkomitmen untuk mengatasi dan memberantas kejahatan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan Vietnam di wilayah perairan Laut Natuna.

Terdapat empat sasaran diplomasi maritim Indonesia terhadap Vietnam, diantaranya adalah melindungi kedaulatan wilayah laut Indonesia dan hak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan eksistensi landas kontinen lingkungan laut sebagai agenda utama diplomasi, memastikan tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia dan keterhubungan antarwilayah di Indonesia melalui instrumen diplomasi maritim, memastikan stabilitas kawasan yang berbasiskan aturan-aturan hukum Internasional serta kepemimpinan dalam masalah kelautan global. penguatan kapasitas nasional untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, dan juga peningkatan pemberitahuan batuan teknis kepada mitra di kawasan dalam masalah maritim.

Vietnam menyambut baik upaya Indonesia dalam mengatasi *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing Vietnam, dan tetap berupaya menjaga hubungan baik Vietnam dengan Indonesia terlepas dari adanya peristiwa *Illegal Fishing* nelayan mereka di Indonesia. Namun pemerintah Indonesia menyayangkan tindakan penenggelaman dan pembakaran kapal yang dilakukan oleh Indonesia terhadap nelayan Vietnam mengingat hubungan baik antar kedua negara yang telah terjalin selama ini. Menurut Vietnam apa yang dilakukan oleh Indonesia tersebut telah bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982.

Terdapat beberapa hambatan yang dialami Indonesia dalam melakukan diplomasi kepada Vietnam diantaranya, Indonesia yang kurang mampu berkompetisi di dunia internasional. Selain itu jangkauan pengawasan yang kurang optimal juga menjadi hambatan lain. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya jumlah kapal pengawas di lapangan. Selain itu, sengketa perbatasan yang masih belum selesai dengan Vietnam juga menjadi hambatan lain yang menghalangi Indonesia dalam memberantas *Illegal Fishing* melalui diplomasi

maritim. Selain itu realisasi negatif yang ditunjukkan oleh negara di kawasan terkait kebijakan peneggelaman kapal juga menjadi hambatan lain yang dihadapi oleh Indonesia untuk memberantas *Illegal Fishing* di Laut Natuna. Namun dalam pelaksanaannya Indonesia sama sekali tidak mendapat hambatan terlepas dari reaksi tersebut.

VI.2 Saran

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan diplomasi maritim Indonesia terhadap Vietnam dalam rangka mengatasi *Illegal Fishing* Vietnam di Laut Natuna periode 2014-2019, penulis akan memaparkan beberapa saran.

VI.2.1 Saran Praktis

Adapun beberapa saran dan usulan yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya:

1. *Penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam.*

Dalam menyelesaikan permasalahan *Illegal Fishing* yang terjadi di Laut Natuna yang melibatkan nelayan asing asal Vietnam, penulis berpendapat bahwa, penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah sengketa perbatasan wilayah laut yang saat ini masih terjadi antara Indonesia dan Vietnam. Karena penulis berpandangan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan laut ini penting bagi Indonesia, karena adanya wilayah tumpang tindih antara Vietnam dan Indonesia telah menghambat upaya Indonesia dalam mengatasi *Illegal Fishing* di Laut Natuna.

Oleh sebab itu diperlukan tindakan diplomasi yang berujung pada hadirnya sebuah kebijakan terkait sengketa wilayah perbatasan laut agar sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam dapat terselesaikan. Karena selama wilayah tumpang tindih antara Indonesia dan Vietnam masih ada, selama itu pula nelayan asing Vietnam merasa berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana.

2. *Lebih memperketat pengawasan terhadap kapal asing yang masuk ke Laut Natuna.*

Seperti yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya Indonesia telah melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal asing yang keluar masuk Laut Natuna, baik kapal Indonesia maupun kapal asing. Namun masih banyak kapal asing yang masih dapat keluar masuk Laut Natuna meskipun tidak punya izin untuk beraktivitas di Laut Natuna maupun menggunakan alat-alat yang dilarang dalam menangkap ikan. Ini disebabkan karena kapal-kapal asing termasuk yang berasal dari Vietnam jumlahnya lebih sedikit daripada kapal pengawas Indonesia yang ada di Natuna.

Oleh sebab itu penulis menilai penting bagi Pemerintah Indonesia untuk lebih memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal yang akan masuk maupun yang akan keluar dari Laut Natuna. Tindakan yang dapat dilakukan seperti menambah jumlah kapal pengawas yang akan mengawasi jalur keluar masuk kapal-kapal asing di Laut Natuna. Selain itu sebagai bentuk pengawasan, pemerintah juga dapat menambah personel yang mengawasi di Laut Natuna. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Laut Natuna merupakan salah satu titik paling rawan yang terkena ancaman *Illegal Fishing* di Indonesia.

3. *Mendorong Pemerintah Vietnam untuk lebih aktif membantu Indonesia dalam mengatasi Illegal Fishing nelayan Vietnam di Laut Natuna.*

Dalam menyelesaikan kasus *Illegal Fishing* di Laut Natuna, penting bagi Indonesia untuk lebih mendorong pemerintah Vietnam untuk dapat membantu Indonesia dalam menangani *Illegal Fishing* nelayan Vietnam di Laut Natuna. Indonesia dapat mendorong Vietnam untuk dapat menindak tegas nelayan-nelayan Vietnam yang melakukan *Illegal Fishing* di negara lain seperti Indonesia. Hal tersebut dapat berupa pemberian saran seperti pemberian hukuman dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku *Illegal Fishing*.

VI.2.1 Saran Teoritis

Kenny Firdaus Tarigan, 2022

DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM KASUS ILLEGAL FISHING VIETNAM DI LAUT NATUNA PERIODE 2014-2019

99

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id–www.library.upnvj.ac.id–www.repository.upnvj.ac.id]

Dalam penelitian ini penulis membahas secara mendalam mengenai diplomasi maritim Indonesia dalam menangani masalah *Illegal Fishing* nelayan Vietnam di Laut Natuna. Mulai dari bentuk-bentuk diplomasi maritim Indonesia terhadap Vietnam, signifikansi dan juga hambatan-hambatan yang dihadapi Indonesia dalam menangani *Illegal Fishing* nelayan Vietnam di Laut Natuna. Penelitian ini juga membahas mengenai berbagai macam tindakan *Illegal Fishing* Vietnam dari tahun 2014-2019 di kawasan perairan Laut Natuna.

Kelemahan dari penelitian ini adalah penulis hanya membahas mengenai diplomasi maritim Indonesia terhadap Vietnam terkait dengan *Illegal Fishing* Vietnam di Laut Natuna. Dalam penelitian ini peneliti hanya menyinggung mengenai respon Vietnam terkait diplomasi dan tindakan yang telah dan akan diambil oleh Indonesia untuk menyelesaikan masalah *Illegal Fishing* Vietnam di Laut Natuna. Dapat dikatakan penelitian ini fokus membahas berbagai macam tindakan dari sisi Indonesia.

Adapun usulan yang dapat penulis berikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah lebih memperbanyak kajian-kajian *Illegal Fishing* dari sisi atau sudut pandang Vietnam, entah itu respon maupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Vietnam untuk mengatasi *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh nelayan mereka di wilayah kedaulatan negara lain. Selain itu penelitian-penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan teori atau konsep yang berbeda dengan yang ada di penelitian skripsi ini.

Penulis berharap penelitian skripsi ini mampu berkontribusi dalam perkembangan ilmu hubungan Internasional khususnya dalam bidang diplomasi maritim. Selain itu penulis juga berharap penelitian skripsi ini dapat menjadi referensi untuk mempelajari diplomasi maritim Indonesia dan juga perkembangan penanganan masalah *Illegal Fishing* di Indonesia khususnya di Laut Natuna.